



KOLEKSI MUSIM PANAS 2023

Desainer Tiongkok dari Bosideng mempersembahkan koleksi Musim Semi/Musim Panas 2023 selama Pekan Mode New York.

Pakistan Kekurangan Pangan Usai Banjir Besar

Banjir telah merusak lebih dari 3,6 juta hektare tanaman di Pakistan.

ISLAMABAD (IM) - Pakistan bergulat dengan kekurangan pangan setelah banjir mematikan membuat lahan pertanian terendam air. Pemerintah meningkatkan upaya untuk mengirimkan makanan, tenda, dan barang-barang lainnya.

Komite Penyelamatan Internasional memperkirakan bahwa banjir telah merusak lebih dari 3,6 juta hektare tanaman di Pakistan. Pakistan sangat bergantung pada pertaniannya dan kadang-kadang mengeksport kelebihan gandumnya ke Afghanistan dan negara-negara lain. Sekarang sedang dalam pembicaraan untuk mengimpor gandum dan sayuran yang sangat dibutuhkan, termasuk kepada masyarakat

yang tidak terkena dampak langsung banjir.

Sementara itu, harga sayur mayur dan bahan pangan lainnya sudah mulai naik. Hingga pekan lalu, air banjir menutupi sekitar sepertiga Pakistan, termasuk lahan pertanian negara itu di Punjab timur dan provinsi Sindh selatan yang merupakan keranjang makanan utama.

Kelompok bantuan internasional terkemuka ini memperingatkan kerugian ekonomi yang meningkat. Kemungkinan menyebabkan kekurangan pangan dan peningkatan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam sebuah pernyataan, IRC mengatakan, banjir menghancurkan lebih dari 3,6 juta hektar tanaman di Pakistan.

"Hilangnya lahan pertanian dan pertanian secara akut kemungkinan akan terasa dalam beberapa bulan dan tahun ke depan. Sangat penting bahwa respons kemanusiaan tetap didanai sepenuhnya untuk memberi orang-orang Pakistan dan lembaga internasional untuk mengirim lebih banyak bantuan.

Perdana Menteri Pakistan Shabbaz Sharif pun berbicara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin (12/9). Dia berterima kasih kepada Turki karena mengirim makanan, tenda, dan obat-obatan dengan 12 pesawat militer, empat kereta api, dan truk Bulan Sabit Merah Turki.

Sebuah pernyataan pemerintah mengatakan, Sharif memberi tahu Erdogan tentang kegiatan bantuan pemerintah. Dia meminta bantuan dari Turki dalam mengatasi kekurangan pangan. Sharif juga meminta bantuan dari Turki untuk pekerjaan rekonstruksi di daerah yang dilanda banjir.

Pemerintah Pakistan awalnya mengatakan, banjir menyebabkan kerusakan senilai

10 miliar dolar AS, tetapi pihak berwenang mengatakan kerusakannya jauh lebih besar dari perkiraan awal. Itu memaksa Pakistan dan PBB untuk mendesak komunitas internasional untuk mengirim lebih banyak bantuan.

Lebih dari 660.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, tinggal di kamp-kamp bantuan dan di tenda darurat setelah banjir merusak rumah di seluruh negeri dan memaksa mereka pindah ke tempat yang lebih aman. Pemerintah Pakistan, militer, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan amal lokal menyediakan makanan untuk para korban banjir ini.

Badan-badan PBB dan berbagai negara telah mengirim lebih dari 60 pesawat bantuan. Pekan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres selama kunjungan ke Pakistan melakukan perjalanan ke daerah yang dilanda banjir dan meminta dunia untuk berhenti pura-pura tidak mengetahui dalam melalui krisis lingkungan yang berbahaya. Dia meyakinkan Sharif akan melakukan yang terbaik untuk menyoroti bencana berat yang dihadapi warga Pakistan yang menghadapi banjir. ● tom

PBB Ungkap Perbudakan Modern Meningkat

JENEWA (IM)-Jumlah orang yang dipaksa bekerja atau menikah di luar kemauan sendiri telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) PBB mengatakan, Senin (12/9), jumlahnya menjadi sekitar 50 juta orang.

Jumlah terbaru tersebut meningkat dibandingkan hitungan terakhir pada 2016. Ketika itu jumlah orang dalam perbudakan modern meningkat sekitar 9,3 juta. Menurut angka terbaru, kerja paksa menyumbang 27,6 juta dari kelompok yang berada dalam perbudakan modern pada 2021, lebih dari 3,3 juta di antaranya adalah anak-anak, dan pernikahan paksa terjadi sebanyak 22 juta.

Krisis seperti pandemi Covid-19, konflik bersenjata, dan perubahan iklim telah menyebabkan gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pekerjaan dan pendidikan. Kondisi ini sambil memperburuk kemiskinan ekstrem dan migrasi paksa.

ILO menemukan lebih dari setengah dari semua kerja paksa terjadi di negara

berpenghasilan menengah ke atas atau berpenghasilan tinggi. Pekerja migran tiga kali lebih mungkin terkena dampaknya.

Laporan terbaru ini menyebutkan, salah satu negara yang termasuk menyumbang kondisi tersebut adalah Qatar. Negara ini yang telah menghadapi tuduhan pelanggaran hak-hak buruh yang meluas terkait dengan para migran yang bekerja di sana menjelang Piala Dunia FIFA yang akan dimulai pada November.

Tapi, sejak ILO membuka kantor di ibu kota Doha pada April 2018, telah terjadi kemajuan yang signifikan terkait kondisi hidup dan kerja bagi ratusan ribu pekerja migran di negara tersebut. Meskipun masih ada masalah dengan penerapan aturan perburuhan baru.

Kepala Eksekutif Qatar 2022 Nasser Al Khater Qatar mengatakan pada pekan lalu, negara itu telah menghadapi banyak kritik yang tidak adil atas tuan rumah Piala Dunia yang tidak didasarkan pada fakta. Mereka mencoba menanggapi setiap kritik yang adil. ● gul

Presiden Tiongkok Xi Jinping Lakukan Kunker Pertama ke Luar Negeri Sejak Pandemi



XI JINPING

TIONGKOK (IM)- Presiden Tiongkok Xi Jinping akan memulai kunjungan kerja pertamanya ke luar negeri sejak dimulainya pandemi Covid-19 pada akhir 2019 di negerinya.

Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa Xi akan menghadiri pertemuan Dewan Kepala Negara Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) yang ke-22 dari Rabu hingga Jumat.

Acara KTT SCO akan diadakan di kota Samarkand, Uzbekistan.

Xi juga akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan dan Uzbekistan atas undangan presiden kedua negara Asia Tengah itu, tambah Hua.

Kunjungan Xi ke luar negeri akan menjadi pusat perhatian pengamat internasional karena presiden Tiongkok telah membatasi diri sejak penutupan perbatasan karena pandemi pada awal 2020.

Dia telah melakukan perjalanan kereta ke Hong Kong Juni ini pada peringatan 20

tahun kembalinya wilayah semi-otonom ke Tiongkok pada tahun 1998.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga dijadwalkan akan menghadiri KTT SCO.

Pertemuan yang akan digelar antara Xi dan Putin akan menjadi yang pertama sejak perang Rusia di Ukraina dimulai pada Februari lalu.

Sebagai organisasi multinasional dan multikultural yang terdiri dari delapan negara, di antaranya Tiongkok, Rusia, Pakistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan India, SCO tahun ini akan menerima Iran sebagai anggota barunya.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga dijadwalkan akan menghadiri KTT tersebut karena Turki, selain Azerbaijan, Kamboja, Nepal, Sri Lanka, dan Armenia, merupakan mitra dialog SCO.

Saat masa jabatan keduanya hampir berakhir, presiden Xi diperkirakan akan dibahas selama Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok (CPC) ke-20 yang dimulai pada 16 Oktober di Beijing. ● gul

Presiden Meksiko Usulkan Rencana Perdamaian Perang di Ukraina



ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR

MEXICO CITY (IM) - Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan akan menjabarkan rencana untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina pada PBB. Ia mengkritik lembaga internasional itu dan mengatakan harus direformasi.

Lopez Obrador yang menjelaskan kebijakan luar negeri non-intervensinya mengusulkan pembentukan "komite mediasi" yang melibatkan Perdana Menteri India Narendra Modi, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Paus Fransiskus.

Pada bulan Mei Modi menyerukan gencatan senjata di Ukraina dan perundingan damai antara pemerintah Ukraina dan Rusia yang menginvasi tetangganya pada 24 Februari lalu.

Berdasarkan rencana Lopez Obrador itu para mediator akan segera memulai pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk mencapai "gencatan senjata setidaknya dalam lima tahun."

Tidak banyak detail dari rencana tersebut tapi dalam konferensi pers rutin, Lopez Obrador mengatakan ia akan membahasnya lebih lanjut dalam perayaan hari kemerdekaan Meksiko pada

Jumat (16/9). "Saya akan membicarakan tentang perdamaian dunia dan saya akan membicarakan tentang posisi Meksiko dalam perang di Rusia dan Ukraina dan saya akan mengkritik lembaga internasional itu dan mengatakan harus direformasi," katanya, Selasa (13/9).

Perang di Ukraina telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi. Rencana perdamaian itu Lopez Obrador sampaikan setelah ia menolak kritik negara-negara musuh di kawasan dan PBB pada kebijakan keamanannya usai Kongres memberikan Angkatan Bersenjata menguasai Garda Nasional yang dipimpin sipil.

Pada Senin (12/9) Lopez Obrador menggambarkan PBB dan kelompok negara di kawasan, Organisasi Negara-negara Amerika yang bermarkas di Washington "seharusnya pembela" hak asasi manusia. Ia mengatakan dua lembaga itu terlalu banyak memakan biaya, tidak memberikan hasil dan harus direformasi.

"Dan ketika saya katakan mereka terlalu mahal, mereka menghasilkan dolar dan hampir tidak berkeringat, mereka tidak bekerja dan Anda harus membayar mereka dan seolah-olah mereka tidak tersentuh, mereka merasa seperti anggota pemerintah dunia," katanya. ● gul

Rusia Disebut Intimidasi Warga yang Tentang Perang Ukraina

KIEV (IM)- Penjabat Komisaris Tinggi HAM PBB mengatakan Rusia mengintimidasi kelompok dan individu yang menentang perang di Ukraina.

"Di Federasi Rusia, intimidasi, tindakan terbatas, dan sanksi terhadap orang-orang yang menyuarakan pertentangan terhadap perang di Ukraina mengacaukan pengalaman kebebasan fundamental yang dijamin secara konstitusional, termasuk hak untuk berkumpul, berekspresi dan berserikat secara bebas," kata Nada Al-Nashif dalam pidato pembukaan Dewan HAM di Jenewa, Senin (12/9) waktu setempat.

Al-Nashif juga melaporkan bahwa Moskow melanggar hak untuk mengakses informasi dengan menekan para wartawan, memblokir internet, dan melakukan berbagai bentuk penyensoran lainnya. Perwakilan diplomatik Rusia di Jenewa tidak langsung menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Moskow menciptakan UU yang lebih tegas tahun ini untuk menghukum orang-orang yang dianggap merendahkan pasukan bersenjata, menyebarkan informasi bohong, atau menyerukan aksi publik ilegal.

Sejumlah organisasi non-pemerintah meminta negara-negara peserta untuk mengadopsi sebuah resolusi saat pertemuan dewan agar pakar

independen dapat menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM di Rusia.

Pekan lalu pengadilan Rusia mencabut lisensi salah satu outlet media independen yang tersisa, Novaya Gazeta.

Majelis Umum PBB menanggukkan Rusia sebagai anggota Dewan HAM beranggotakan 47 negara pada April sebagai akibat dari invasi mereka di Ukraina yang dimulai pada 24 Februari.

Rusia menyangkal menargetkan warga sipil di Ukraina dan menyebut aksinya di negara tersebut sebagai "operasi militer khusus" yang bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur militer Ukraina. ● ans



MUSEUM SEJARAH TIONGHOA AUSTRALIA

Terletak di jantung Pecinan Melbourne, Museum Sejarah Tiongkok Australia tidak hanya merupakan lambang sejarah, tetapi juga warisan bagi semua komunitas Tiongkok untuk memahami silsilah mereka. Foto diambil Senin (12/9).

6,2 Juta Orang di Sri Lanka Alami Rawan Pangan

ROMA (IM) - Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan, sebanyak 6,2 juta warga Sri Lanka mengalami kerawanan pangan. Jumlah tersebut sekitar 28 persen dari total populasi negara tersebut.

"Lebih dari 6,2 juta orang (di Sri Lanka) diperkirakan mengalami kerawanan pangan akut sedang dan 66 ribu orang mengalami kerawanan pangan akut parah," kata FAO dan WFP dalam laporan bersama, Senin (12/9), dikutip laman Sputnik.

Menurut WFP dan FAO, situasi keamanan dapat terus memburuk. Hal itu bisa memicu minimnya barang-barang impor, penurunan produksi pertanian, kenaikan harga, dan gangguan mata pencaharian.

Saat ini Sri Lanka sedang dibekap krisis ekonomi terbaru dalam 70 tahun terakhir. Negara tersebut telah menghadapi gelombang demonstrasi sejak Maret lalu. Mereka menuntut perbaikan hidup dan

reformasi pemerintahan. Pada Juni lalu, inflasi di Sri Lanka mencapai 54,6 persen. Pada 13 Juli lalu, Gotabaya Rajapaksa akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Sri Lanka.

Pada Agustus lalu, angka inflasi di Sri Lanka telah menembus 64,3 persen. Negara tersebut sudah kesulitan mengimpor barang-barang, termasuk bahan bakar minyak (BBM) karena utang pembelian minyaknya telah mengungguli.

Sri Lanka sudah mencapai kesepakatan awal dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket bantuan senilai 2,9 miliar dolar AS selama empat tahun. Namun, program tersebut bergantung pada jaminan restrukturisasi utang dari kreditur setelah negara tersebut mengumumkan bahwa mereka menanggukkan pembayaran utang luar negerinya. Saat ini, negara tersebut memiliki utang luar negeri sebesar 51 miliar dolar AS. Sebanyak 28 miliar dolar AS di antaranya harus dibayar pada 2027. ● ans